

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Daftar Isi

	Paragraf
Pendahuluan	1 - 7
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 - 4
Basis Akuntansi	5 - 7
Definisi	8
Tujuan Laporan Keuangan	9 - 12
Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan	13
Komponen-Komponen Laporan Keuangan	14 - 24
Struktur dan Isi	25 - 113
Pendahuluan.	25 - 26
Identifikasi Laporan Keuangan	27 - 31
Periode Pelaporan	32 - 33
Tepat Waktu	34
Laporan Realisasi Anggaran	35 - 40
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	41 - 43
Neraca	44 - 85
Klasifikasi	45 - 53
Aset lancar	54 - 55
Aset nonlancar	56 - 66
Pengakuan aset	67 - 68
Pengukuran aset	69 - 74
Kewajiban jangka pendek	75 - 77
Kewajiban jangka panjang	78 - 80
Pengakuan kewajiban	81 - 82
Pengukuran kewajiban	83
Ekuitas	84 - 85
Informasi yang disajikan dalam Neraca atau dalam	
Catatan atas Laporan Keuangan	86 - 88
Laporan Arus Kas	89 - 91
Laporan Operasional	92 - 100
Laporan Perubahan Ekuitas	101 - 103
Catatan Atas Laporan Keuangan	104 - 113
Struktur	104 - 107
Penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi	108 - 112
Pengungkapan-pengungkapan lainnya	113
Tanggal Efektif	114 - 115

Lampiran :

Ilustrasi Lampiran PSAP 01.A	:	Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat
Ilustrasi Lampiran PSAP 01.B	:	Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Ilustrasi Lampiran PSAP 01.C	:	Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat
Ilustrasi Lampiran PSAP 01.D	:	Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota
Ilustrasi Lampiran PSAP 01.E	:	Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Pusat
Ilustrasi Lampiran PSAP 01.F	:	Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Ruang Lingkup

2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.*

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

Basis Akuntansi

5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

6. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

DEFINISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

1 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
2 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,
3 dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4 **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
5 peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
6 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7 **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
8 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

9 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
10 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
11 bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
12 pemerintah.

13 **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
14 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
15 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

16 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
17 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
18 tahun anggaran.

19 **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
20 aset dan kewajiban pemerintah.

21 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna
22 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
23 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

24 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
25 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
26 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
27 berupa laporan keuangan.

28 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
29 ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga
30 dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
31 kepada masyarakat

32 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
33 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

34 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
35 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
36 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.

37 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
38 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
39 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

1 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
2 aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
3 pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
5 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan
6 menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

7 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
8 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
9 pemerintah

10 **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang
11 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau
12 entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

13 **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
14 antara dua laporan keuangan tahunan.

15 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

16 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
17 menyajikan laporan keuangan.

18 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
19 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
20 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
21 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
22 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

23 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
24 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

25 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan
26 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi
27 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum
28 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode
29 otorisasi tersebut.

30 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
31 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
32 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
33 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
34 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

35 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
36 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
37 tidak perlu dibayar kembali.

38 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
39 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

1 *anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu*
2 *dibayar kembali oleh pemerintah.*

3 *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang*
4 *dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang*
5 *bersangkutan.*

6 *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang*
7 *dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan*
8 *barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam*
9 *rangka pelayanan kepada masyarakat.*

10 *Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima*
11 *pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-*
12 *undangan.*

13 *Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka*
14 *laporan keuangan.*

15 *Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang*
16 *terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,*
17 *tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau*
18 *pengaruh entitas bersangkutan.*

19 *Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang*
20 *negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum*
21 *Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar*
22 *seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.*

23 *Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang*
24 *daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung*
25 *seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah*
26 *pada bank yang ditetapkan.*

27 *Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari*
28 *akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun*
29 *berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.*

30 *Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing*
31 *ke rupiah pada kurs yang berbeda.*

32 *Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap*
33 *dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang*
34 *signifikan.*

35 *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih*
36 *lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta*
37 *penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu*
38 *periode pelaporan.*

1 **Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama**
2 **satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan**
3 **non operasional dan pos luar biasa.**

4 **Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan**
5 **belanja selama satu periode pelaporan.**

6 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.**

7 **Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan**
8 **dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana**
9 **bagi hasil.**

10 **Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan**
11 **pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-**
12 **undangan.**

13 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

14 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
15 keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
16 Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
17 keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
18 perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
19 dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
20 Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan
21 informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
22 akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
23 dengan:

- 24 (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
25 dan ekuitas pemerintah;
- 26 (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
27 kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 28 (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
29 daya ekonomi;
- 30 (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 31 (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
32 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 33 (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
34 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 35 (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
36 entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

37 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif
38 dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya
39 sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya
40 yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian

yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

(a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

(b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

(a) aset;

(b) kewajiban;

(c) ekuitas;

(d) pendapatan-LRA;

(e) belanja;

(f) transfer;

(g) pembiayaan;

(h) saldo anggaran lebih

(i) pendapatan-LO;

(j) beban; dan

(k) arus kas.

12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (Statement of Budget Realization) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:*

(a) *Laporan Realisasi Anggaran;*

(b) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*

(c) *Neraca;*

(d) *Laporan Operasional;*

(e) *Laporan Arus Kas;*

- 1 (f) **Laporan Perubahan Ekuitas;**
2 (g) **Catatan atas Laporan Keuangan.**

3 15. **Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh**
4 **setiap entitas pelaporan, kecuali:**

- 5 (a) **Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh**
6 **entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;**
7 (b) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang**
8 **hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan**
9 **yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.**

10 16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang
11 ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa
12 bendahara umum negara/daerah.

13 17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk
14 apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi
15 mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai
16 dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat
17 anggaran dan realisasi.

18 18. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran
19 Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya,
20 penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
21 (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

22 19. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi
23 dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya
24 ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk
25 melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam
26 menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

27 20. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna
28 dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya
29 dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya
30 ekonomi.

31 21. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan
32 informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
33 suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

34 22. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang
35 mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak
36 kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

37 23. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan
38 keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik
39 yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan
40 keuangan.

24. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

25. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

26. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Identifikasi Laporan Keuangan

27. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

28. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.

29. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- (b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- (c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- (d) mata uang pelaporan; dan
- (e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

30. Persyaratan dalam paragraf 27 dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

31. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

32. *Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:*

- (a) *alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,*
- (b) *fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

33. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Tepat Waktu

34. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

35. *Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.*

36. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

37. *Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:*

- 1 (a) ***Pendapatan-LRA;***
- 2 (b) ***belanja;***
- 3 (c) ***transfer;***
- 4 (d) ***surplus/defisit-LRA;***
- 5 (e) ***pembiayaan;***
- 6 (f) ***sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.***

7 **38. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara**
8 ***anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.***

9 39. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
10 Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi
11 pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
12 terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta
13 daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk
14 dijelaskan.

15 40. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian
16 Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

17 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

18 **41. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara**
19 ***komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:***

- 20 (a) ***Saldo Anggaran Lebih awal;***
- 21 (b) ***Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;***
- 22 (c) ***Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;***
- 23 (d) ***Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan***
- 24 (e) ***Lain-lain;***
- 25 (f) ***Saldo Anggaran Lebih Akhir.***

26 **42. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih**
27 ***lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo***
28 ***Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

29 43. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan pada
30 ilustrasi PSAP 01 E dan 01 F. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan
31 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan
32 penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

33 **NERACA**

34 44. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
35 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Klasifikasi

45. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

46. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

47. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

48. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

49. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- (a) **kas dan setara kas;**
- (b) **investasi jangka pendek;**
- (c) **piutang pajak dan bukan pajak;**
- (d) **persediaan;**
- (e) **investasi jangka panjang;**
- (f) **aset tetap;**
- (g) **kewajiban jangka pendek;**
- (h) **kewajiban jangka panjang;**
- (i) **ekuitas.**

50. Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

51. Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi PSAP 01.A dan 01.B Standar ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

52. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

53. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

Aset Lancar

54. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:*

- (a) *diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau*
- (b) *berupa kas dan setara kas.*
- (c) *Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.*

55. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset Nonlancar

56. *Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.*

57. *Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.*

58. *Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.*

59. *Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*

- 1 60. *Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang*
2 *dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.*
- 3 61. *Investasi nonpermanen terdiri dari:*
- 4 (a) *Investasi dalam Surat Utang Negara;*
5 (b) *Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan*
6 *kepada pihak ketiga; dan*
7 (c) *Investasi nonpermanen lainnya*

62. *Investasi permanen terdiri dari:*

- (a) *Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.*
- (b) *Investasi permanen lainnya.*

63. *Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.*

64. *Aset tetap terdiri dari:*

- (a) *Tanah;*
- (b) *Peralatan dan mesin;*
- (c) *Gedung dan bangunan;*
- (d) *Jalan, irigasi, dan jaringan;*
- (e) *Aset tetap lainnya; dan*
- (f) *Konstruksi dalam pengerjaan.*

65. *Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.*

66. *Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.*

Pengakuan Aset

67. *Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*

68. *Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.*

Pengukuran Aset

69. *Pengukuran aset adalah sebagai berikut:*

- (a) *Kas dicatat sebesar nilai nominal;*
- (b) *Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;*
- (c) *Piutang dicatat sebesar nilai nominal;*
- (d) *Persediaan dicatat sebesar:*
 - i. *Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*

- 1 ii. **Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
2 iii. **Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/**
3 **rampasan.**

4 70. **Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk**
5 **biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang**
6 **sah atas investasi tersebut;**

7 71. **Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset**
8 **tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai**
9 **aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

10 72. **Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap**
11 **dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

12 73. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
13 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
14 termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
15 peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
16 aset tetap tersebut.

17 74. **Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan**
18 **dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs**
19 **tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

20 **Kewajiban Jangka Pendek**

21 75. **Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek**
22 **jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal**
23 **pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban**
24 **jangka panjang.**

25 76. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama
26 seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer
27 pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan
28 menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

29 77. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo
30 dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga
31 pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga
32 (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

33 **Kewajiban Jangka Panjang**

34 78. **Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka**
35 **panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk**
36 **diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan**
37 **jika:**

- 38 (a) **jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)**
39 **bulan;**

1 (b) **entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas**
2 **dasar jangka panjang; dan**

3 (c) **maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan**
4 **kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap**
5 **pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.**

6 **Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek**
7 **sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang**
8 **mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan**
9 **Keuangan.**

10 79. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun
11 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan
12 (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan
13 segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk
14 menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan
15 sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan
16 pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya
17 persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat
18 dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos
19 jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum
20 persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada
21 tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

22 80. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu
23 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban
24 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan
25 posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat
26 diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

27 (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
28 konsekuensi adanya pelanggaran, dan

29 (b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas)
30 bulan setelah tanggal pelaporan.

31 **Pengakuan Kewajiban**

32 81. **Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran**
33 **sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang**
34 **ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut**
35 **mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**

36 82. **Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat**
37 **kewajiban timbul.**

38 **Pengukuran Kewajiban**

39 83. **Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata**
40 **uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran**

1 *mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal*
2 *neraca.*

3 **Ekuitas**

4 84. *Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih*
5 *antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.*

6 85. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
7 Perubahan Ekuitas.

8 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN** 9 **ATAS LAPORAN KEUANGAN**

10 86. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca*
11 *maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang*
12 *disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas*
13 *yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana*
14 *perlu, sesuai dengan sifatnya.*

15 87. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan
16 atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi
17 Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang
18 disebutkan dalam paragraf 86 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi
19 subklasifikasi.

20 88. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 21 (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait,
22 uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
- 23 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi
24 untuk persediaan;
- 25 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang
26 mengatur tentang aset tetap;
- 27 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- 28 (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- 29 (f) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan
30 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
31 pengendalian dan metode penilaian.

32 **LAPORAN ARUS KAS**

33 89. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
34 perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
35 setara kas pada tanggal pelaporan.

36 90. *Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas*
37 *operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.*

91. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

LAPORAN OPERASIONAL

92. *Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:*

- (a) *Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;*
- (b) *Beban dari kegiatan operasional ;*
- (c) *Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;*
- (d) *Pos luar biasa, bila ada;*
- (e) *Surplus/defisit-LO.*

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

93. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

94. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

95. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

96. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

97. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

98. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

99. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

100. PSAP 12 menguraikan secara lebih rinci Laporan Operasional yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, yang contoh formatnya dapat dilihat pada ilustrasi PSAP 12.A dan 12.B.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

101. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:*

(a) *Ekuitas awal*

(b) *Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;*

(c) *Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:*

i.koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

ii.perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

(d) *Ekuitas akhir.*

102. *Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

103. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi PSAP 01.C dan 01.D. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

104. *Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:*

- (a) **Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**
- (b) **Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**
- (c) **Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- (d) **Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- (e) **Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;**
- (f) **Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;**
- (g) **Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

105. **Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

106. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**

107. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

108. **Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- (a) **dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;**
- (b) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan**

(c) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.**

109. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

110. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- (b) Pengakuan belanja;
- (c) Pengakuan beban;
- (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- (e) Investasi;
- (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
- (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
- (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- (l) Dana cadangan;
- (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

111. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

112. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

113. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:*

- (a) *domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;*
- (b) *penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
- (c) *ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.*

TANGGAL EFEKTIF

114. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

115. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju AkruaI paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR	xxx	xxx
4	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	Investasi Jangka Panjang		
23	Investasi Non Permanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
29	Jumlah nonpermanent Investment (24 s/d 28)	xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Negaran	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (31s/d 32)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29+33)	xxx	xxx
35			
36	Aset Tetap		
37	Tanah	xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx

42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)	xxx	xxx
45			
46	Aset Lainnya		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
54	JUMLAH ASET	xxx	xxx
55			
56	KEWAJIBAN		
57			
58	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)	xxx	xxx
66		xxx	xxx
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)	xxx	xxx
74	JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)	xxx	xxx
75			
76	EKUITAS		
77	EKUITAS	xxx	xxx
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)	xxx	xxx

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASSET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	Investasi Jangka Panjang		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+32)	xxx	xxx
34			
35	Aset Tetap		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx

41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxx	xxx
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxx	xxx

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERATURAN PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 71 TAHUN 2010
 ILUSTRASI PSAP 01.C

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LI
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PERATURAN PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 71 TAHUN 2010
 ILUSTRASI PSAP 01.F

(dalam Rupiah)

N O	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx (xxx)	xxx (xxx)
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx